

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NAMA : YUDI ARTO, S.H., M.M.
NIP : 197506101997031001
JABATAN : KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam era pelayanan publik yang semakin dinamis dan kompleks, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, responsif, dan akuntabel. SDM yang kompeten dan profesional merupakan prasyarat mutlak untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan kompetensi, hingga reformasi struktural organisasi, perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis.

Namun, dalam proses pengembangan kapasitas SDM, terdapat berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Risiko tersebut dapat bersumber dari aspek internal, seperti keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, hingga rendahnya komitmen pimpinan, sedangkan dari aspek eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-politik, dan perkembangan teknologi. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko ini dapat menyebabkan inefisiensi, rendahnya kualitas output pengembangan, bahkan kegagalan program.

Manajemen risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam setiap tahap pengembangan kapasitas SDM menjadi sangat penting. Dengan pendekatan manajemen risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini, menganalisis dampaknya, serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Manajemen risiko bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Dengan integrasi antara pengembangan kapasitas SDM dan manajemen risiko yang baik, diharapkan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan adaptif terhadap berbagai tantangan dan perubahan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang manajemen risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan bahwa seluruh proses peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul serta dampaknya terhadap

pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik.

Tujuan

Tujuan dari manajemen risiko dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat atau menggagalkan program pengembangan kapasitas SDM.
2. Meningkatkan kesiapan organisasi dalam mengantisipasi dan merespons perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang berdampak pada pengembangan SDM.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM, dengan cara meminimalkan gangguan atau hambatan melalui mitigasi risiko yang tepat.
4. Mendukung pencapaian tujuan strategis pelayanan publik, melalui penguatan kapasitas SDM yang tangguh dan adaptif terhadap risiko.
5. Mendorong budaya sadar risiko di lingkungan birokrasi, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
6. Menjamin keberlanjutan program pengembangan SDM, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian, keterbatasan sumber daya, atau tantangan kebijakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan terkait manajemen risiko dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup berbagai aspek strategis dan operasional terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pengembangan kapasitas SDM.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan manajemen risiko dalam pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung pelayanan publik seperti:

No.	Uraian Kegiatan	Manajemen Risiko (Analisa SWOT)
1.	Kegiatan <i>Workshop</i> Dalam Rangka Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan,	Analisa SWOT: a. <i>Strengths</i> (Kekuatan) Menumbuhkan budaya kerja positif yang berorientasi pada pelayanan publik

	Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Untuk Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	b. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan) Pemahaman budaya kerja sering kali belum diimplementasikan secara konsisten c. <i>Opportunities</i> (Peluang) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik d. <i>Threats</i> (Ancaman) Tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang terkadang belum diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai yang mendalam
2.	Kegiatan Simulasi Penanganan Kebakaran Sebagai Mitigasi Dini Menghadapi Risiko Kebakaran Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisa SWOT: a. <i>Strengths</i> (Kekuatan) Memberikan pemahaman teknis tentang prosedur evakuasi dan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) b. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan) Tidak semua pegawai terlibat aktif karena jadwal dan kegiatan kerja c. <i>Opportunities</i> (Peluang) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme instansi pemerintah d. <i>Threats</i> (Ancaman) Simulasi dapat mengganggu operasional pelayanan publik jika tidak direncanakan dengan matang
3.	Kegiatan <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> Manajemenen Risiko Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisa SWOT: a. <i>Strengths</i> (Kekuatan) Mendorong pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan dan menciptakan budaya sadar risiko dalam pelayanan publik b. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan) Waktu pelaksanaan terbatas karena kesibukan tugas pegawai c. <i>Opportunities</i> (Peluang) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan risiko yang lebih baik d. <i>Threats</i> (Ancaman)

		Perubahan kebijakan yang berdampak pada keberlanjutan program
4.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisa SWOT: a. <i>Strengths</i> (Kekuatan) Dapat memotivasi dan meningkatkan semangat kerja pegawai b. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan) Bisa menimbulkan kecemburuan antar pegawai jika tidak dikelola dengan adil c. <i>Opportunities</i> (Peluang) Memanfaatkan teknologi (Sistem E-Voting Pegawai Teladan untuk Agen Perubahan – Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta) untuk proses pemilihan yang objektif dan transparan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik d. <i>Threats</i> (Ancaman) Resistensi dari pegawai jika proses pemilihan tidak objektif dan transparan

C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai atas manajemen risiko dalam pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya Budaya Sadar Risiko di Lingkungan Kerja

Pegawai mulai terbiasa untuk memetakan risiko dan mencari solusi atas permasalahan, baik dalam pengembangan diri maupun pelaksanaan tugas pelayanan publik.

2. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pegawai

Pegawai menjadi lebih kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan lingkungan kerja, sehingga mendukung terciptanya pelayanan yang responsif dan profesional.

3. Peningkatan Keterlibatan dan Motivasi Pegawai

Manajemen risiko dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan

partisipatif, di mana pegawai merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan diri. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai terhadap organisasi.

4. Pencapaian Tujuan Organisasi yang Lebih Baik

Dengan memastikan bahwa pengembangan SDM berjalan lancar dan efektif, organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan lebih baik. Pengembangan SDM yang berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam hal pelayanan publik.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang terkait dengan pengembangan SDM, organisasi dapat memastikan bahwa program kerja yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Manajemen risiko merupakan komponen krusial dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses pengembangan SDM, berbagai risiko dapat muncul, baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, resistensi perubahan, maupun dari faktor eksternal seperti dinamika regulasi dan perkembangan teknologi.

Dengan implementasi manajemen risiko yang terstruktur, melalui proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengantisipasi hambatan sejak dini dan meresponsnya secara tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas program pengembangan SDM, tetapi juga memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan lingkungan strategis.

Integrasi antara pengembangan kapasitas SDM dan manajemen risiko akan menghasilkan SDM yang lebih adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk menanamkan budaya sadar risiko sebagai bagian dari tata kelola yang baik serta strategi peningkatan kinerja pelayanan publik secara menyeluruh.

Saran

Manajemen risiko dalam pengembangan kapasitas SDM dalam mendukung pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberlanjutan pelayanan. Beberapa saran terkait hal ini meliputi identifikasi risiko SDM, analisis dan evaluasi risiko, pengembangan strategi mitigasi, serta pemantauan dan peninjauan risiko secara berkala. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pengembangan kapasitas SDM, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi.

E. Penutup

Demikian laporan manajemen risiko dalam pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta ini dibuat sebagai salah satu langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja SDM secara menyeluruh. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 16 Juli 2025

Alumni,



Yudi Arto

Mengetahui,
KEPALA

Jabatan Atasan Langsung Alumni



Agung Rekriono Seto

Lampiran (Dokumentasi)

1. Kegiatan *Workshop* Dalam Rangka Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Untuk Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta



2. Kegiatan Simulasi Penanganan Kebakaran Sebagai Mitigasi Dini Menghadapi Risiko Kebakaran Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta



3. Kegiatan *Coaching* dan *Mentoring* Manajemenen Risiko Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta



4. Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

